



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sungai Pun Dinaturalisasi

Jurus Anies Baswedan Melawan Banjir

JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berusaha mati-matian menepati janji politiknya. Saat mencalonkan diri maju menjadi orang nomor satu dalam pemerintah provinsi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berjanji menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota.

Jalan setahun lebih enam bulan menjabat gubernur, faktanya air masih menggenangi Jakarta saat hujan. Dalam beberapa pekan terakhir ini misalnya, sejumlah air pada Kali Kulo meluap. Debit air yang berlebihan menyebabkan Tanggul Jatipadang jebol. Alhasil daratan dan permukiman warga di sekitarnya terendam banjir. Masyarakat pun gerah dan menuntut janji tersebut kepada Anies Baswedan

Tapi, sepupu Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan itu bukannya tanpa upaya. Beberapa kali Anies turun ke lapangan untuk meninjau langsung persoalan banjir. Aksi nyata dilakukan pada Kamis (4/11) lalu. Dia meninjau saluran air yang ternyata tersumbat dari sisa material pembangunan tiang Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek di Cawang, Jakarta Timur.

Saat itu, Anies geram karena lumpur sisa-sisa material bahkan menutupi sepertiga dari drainase. Dia pun langsung memberi teguran kepada PT Adhi Karya selaku kontraktor proyek pembangunan LRT Jabodetabek.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga baru saja menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi. Peraturan yang diterbitkan pada 1 April lalu, diharapkan menjadi jurus jitu Anies melawan banjir yang terus menjadi momok di ibu kota.

Pergub tersebut merupakan realisasi atas ide yang diputuskan pada 7 Februari 2018. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi utama sungai. Yakni sebagai tempat ekosistem serta habitat hewan dan tumbuhan. Sekaligus sumber baku air. Bukan menjadi tempat cuci baju atau membuang sampah dan kotoran (lihat infografis halaman 9).

Inspirasi naturalisasi sungai didapatkan dari kota-kota besar di dunia seperti Singapura,

Tokyo dan Sydney. Sebab, saat ini pembangunan kota-kota megapolitan di dunia sudah bergerak ke arah green city dan naturalisasi termasuk salah satu di dalamnya. "Sekarang seluruh dunia sedang bergerak menuju kota hijau. Coba lihat Tokyo dan Singapura. Mereka tidak lagi memiliki lahan, tapi naturalisasi tetap bisa berjalan di sana," kata Anies beberapa waktu lalu.

Melalui naturalisasi, ekosistem di sungai akan terbangun. Hasilnya air bisa terserap, memperlambat arus, dan mempertahankan ekosistem hijau di sekitar sungai. Hal tersebut, kata Anies, tak bisa terwujud jika yang dilakukan adalah betonisasi terhadap badan sungai seperti yang terjadi selama ini. tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengharapkan, program naturalisasi sungai tidak hanya menyelesaikan persoalan banjir. Sekaligus ikut menyelamatkan ekosistem.

Selain berfungsi untuk mencegah banjir yang disebabkan oleh aliran air yang melebihi kapasitas sungai, air yang tertahan juga dapat digunakan sebagai air baku yang dapat diolah menjadi air bersih oleh PD PAM Jaya. "Naturalisasi itu mengupayakan aliran air ditangkap, ditahan, dan mudah-mudahan jadi air baku. Sungai-sungai itu biarkan dalam bentuk natural supaya bisa menahan run off," terangnya.

Selain itu, konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta pun juga ikut dibantu dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang difungsikan untuk menampung air atau re-

tarding basin.

Yusmada menerangkan air hujan yang masuk akan dibiarkan menggenangi di RTH dan secara otomatis akan terserap ke dalam tanah dalam waktu kurang lebih dua jam. Bahkan, bila perlu air yang turun di atas RTH akan dibendung agar bisa sepenuhnya terserap, dan menambah cadangan air tanah DKI Jakarta.

Dalam konsep naturalisasi, pengendalian banjir tak hanya mengandalkan sungai. Yusmada mengatakan air hujan dan air kiriman sebisa mungkin ditahan di hulu. Air itu bakal dialirkan ke waduk dan situ yang terus dibangun Pemprov DKI. "Poinnya kapasitas sungai itu dipastikan sesuai dengan debitnya. Pertanyaannya debitnya maksimum kami lebarkan atau kami pertahankan debit yang ada," ujar Yusmada.

Ia mencontohkan kasus banjir di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sama seperti banjir-banjir sebelumnya, banjir saat itu karena Kali Pulo meluap dan tanggulnya jebol. Tanggul di Jatipadang mulai sering jebol tahun 2017.

Sejak Oktober 2017 hingga kini, tanggul jebol sudah enam kali. Pemerintah kemudian membangun tanggul yang lebih kokoh dan tinggi. Air yang mengalir di Kali Pulo bisa menghasilkan tekanan yang kuat dan deras jika terjadi hujan.

Air kali itu berasal dari dua hulu yakni Pintu Air Setu Babakan dan Pintu Air Betawi Ngumpul. Debit yang besar itu tak didukung lebar kali yang ada. Semakin ke hilir Kali Pulo menyempit. Bahkan di Jatipadang, badan-badan air diokupasi warga menjadi jem-

batan dan rumah.

Alih-alih sibuk menata Kali Pulo dan kawasan Jatipadang, DKI berusaha mengurangi air yang mengalir. Yusmada menjelaskan pihaknya berencana akan membangun sodetan untuk mengendalikan banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan.

Sodetan dibangun buat mengalirkan air dari hulu ke Setu Babakan sebelum ke Kali Pulo. "Aliran dari Depok itu bisa dibuat sodetan ke Setu Babakan. Karena Setu Babakan itu belum penuhampungannya. Kalau ditampung di Setu Babakan, bisa berkurang sampai Jatipadang," ujar dia.

Demi melancarkan proses naturalisasi ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Koordinasi terkait keberlanjutan pembebasan lahan untuk normalisasi dan naturalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter.

Namun, Yusmada mengakui pembebasan lahan di sekitar sungai bukanlah perkara mudah. "Komitmen tetap ada tapi kan pembebasan lahan itu enggak semudah membalik tangan. Sungai kita banyak permukiman, itu fakta yang harus kita hadapi," keluh Yusmada.

Konsekuensi dari program ini adalah adanya warga yang akan direlokasi. Jumlah warga yang akan direlokasi cukup banyak karena mencakup wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dari sisi anggaran, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,3 triliun lewat APBD 2019. Jumlah itu terbagi dua, Rp 800 miliar untuk normalisasi, dan Rp 500 miliar se-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sungai Pun Dinaturalisasi

NATURALISASI SUNGAI ALA PEMPROV DKI JAKARTA

Menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi

Tanggal Terbit : 1 April 2019

Tujuan

- Meningkatkan daya dukung prasarana sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir
- Konservasi sumber daya air beserta ekosistemnya
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Cara

- Mengembangkan konsep ruang terbuka hijau
- Memerhatikan kapasitas penampungan
- Menaturalisasi 14 waduk pengendali banjir

Waduk yang dinaturalisasi

- Waduk Cimanggi
- Embung Aseli
- Embung Jalan Cendrawasih
- Waduk Pekayon
- Waduk Pondok Rangan
- Embung Jalan Sejuk
- Cilangkap Giri Kencana
- Waduk Jagakarsa
- Waduk Jakan Kaja 2
- Kalibaru Timur
- Waduk Kampung Rambutan
- Waduk Babek TNI
- Embung Kelurahan Semper Barat
- Embung Jalan Cilincing Kesatrian

Upaya lainnya

- Melakukan normalisasi sungai dengan cara pengerukan
- Melancarkan aliran air atau drainase di permukiman dan daratan
- Merelokasi permukiman warga yang tinggal di bantaran sungai

Anggaran penanggulangan banjir

Normalisasi sungai : Rp 800 miliar
 Normalisasi waduk : Rp 500 miliar
 Total : Rp 1,3 triliun

Sumber : diolah

bagai pengadaan tanah sungai dan saluran air.

Para legislator di Kebon Sirih pun ikut mendukung program naturalisasi sungai ini. Diterbitkannya Pergub Nomor 31 Tahun 2019, juga dinilai sebagai komitmen untuk dinas terkait menjalankan program naturalisasi sungai di ibu kota. "Jakarta sejauh ini belum terbebas dari banjir. Dengan keluarnya pergub ini, kami ingin ancaman banjir di ibu kota dapat diminimalisir," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Firmansyah, Senin (8/4).

Sebagai produk hukum, peraturan itu mengatur soal penataan RTH, serta lahan basah, aspek ekologi untuk penghijauan, pengolahan sampah dan kualitas air, hingga pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator.

Pembangunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti badan usaha, akademis, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang turut terlibat.

"Jika nanti pergub ini dijalankan, naturalisasi di sungai diharapkan juga diterapkan di saluran-saluran penghubung menuju sungai-sungai yang ada," tandasnya. (wok)